

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Junrejo adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kota Batu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kecamatan Junrejo dibagi menjadi 7 desa, yaitu Desa Beji, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Tlekung, Desa Torongrejo dan Kelurahan Dadaprejo. Desa Pendem merupakan wilayah yang menjadi pintu gerbang menuju Kota Batu, yang memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Caru, Dusun Pendem, Dusun Sekarputih dan Dusun Mojorejo. Masyarakat yang tinggal di Desa Pendem rata-rata adalah seorang petani dan bekerja di ladang sayur mayur. Selain itu, karena Desa Pendem masih tergolong berada di dataran yang rata, maka tidak sedikit juga masyarakat yang bekerja diluar bidang pertanian, seperti memperjualbelikan hasil anyaman bambu serta menjual pasir yang telah dikumpulkan dari Sungai Brantas yang melintas di daerah perbatasan antara Desa Mojorejo, Dadaprejo dan Torongrejo. Tanah yang subur di Desa Pendem menjadi tempat yang ideal untuk bercocok tanam, terutama untuk menanam sayuran, padi, dan jagung. Sehingga keistimewaan yang membuat Desa Pendem unik adalah perannya sebagai produsen padi terbesar di Kota Batu (TV One News, 2023)

Masyarakat di Desa Pendem tergolong sebagai masyarakat yang pola pikirnya masih terpengaruh oleh kehidupan pedesaan, dengan kehidupan komunitas atau organisasi yang erat dan pola interaksi sosial yang lebih terbatas. Dalam sosiologi pedesaan, dijelaskan bahwa masyarakat desa cenderung memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat, jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Pola pikir mereka terfokus pada kepentingan komunitas daripada kepentingan individu. Beberapa kajian sosiologi, menunjukkan bahwa konsep komunitas tidak

dapat selalu didefinisikan secara tunggal, namun juga mencakup ide-ide mengenai sosialisasi, *feedback* dan eksistensi bersama (Madara, 2019).

Pola pikir masyarakat desa cenderung lebih tradisional, dengan nilai-nilai yang lebih konservatif dan terpusat pada kehidupan komunitas (Louis Wirth). Masih banyak kegiatan seperti gotong royong atau acara-acara sosial yang menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat setempat. Menilik informasi dari Kominfo, Desa Pendem di Kota Batu sudah mendapatkan akses informasi dan teknologi yang cukup memadai. Berdasarkan data dari website resmi Desa Pendem, total penduduk Desa Pendem adalah 13.113 jiwa, dengan persentase terbesar ada pada usia 20-49 tahun yang merupakan usia produktif. Di samping mata pencaharian utama sebagai petani dan karyawan swasta, sebanyak 5,17% penduduk juga bekerja sebagai TNI, bertepatan dengan adanya Pusdik Arhanud di Desa Pendem.

Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara (Pusdik Arhanud) sendiri merupakan satuan yang berkedudukan di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) dan bertugas menyelenggarakan pendidikan kecabangan Artileri Pertahanan Udara dalam rangka mendukung tugas Pussenarhanud Kodiklat TNI AD. Pusdik memberikan pendidikan sejak dini yang dilanjutkan ke jenjang spesialisasi di Politeknik Angkatan Darat (Poltekad). Berdirinya Pusdik Arhanud pada tahun 1960-an, membuat masyarakat seolah mengalami masa peralihan, karena sebelumnya marak terjadi tindak kriminal di daerah tersebut, terutama pencurian. Sangat tidak beralasan keberadaan TNI-Polri membuat masyarakat ketakutan, karena yang pasti dengan adanya aparat keamanan lah masyarakat merasa aman (Kapendam XVII Cenderawasih Kol. Inf M. Aidi, dalam wawancara Antara News 2019).

Adanya Pusdik Arhanud sebagai institusi militer di daerah tersebut, tentunya membawa perubahan baik, terutama bagi keamanan di daerah tersebut. Namun, hal itu tidak membuat hubungan antara Pusdik Arhanud sebagai lembaga militer dengan masyarakat sekitar menjadi dekat. Sehingga tumbuh persepsi masyarakat mengenai Pusdik Arhanud yang kaku dan

sangat rahasia. Hal ini terjadi karena lembaga militer memang erat kaitannya dengan perilaku yang tegas, kaku, agresif dan otoriter. Selain itu, orang-orang yang berkecimpung di dunia militer yang bertugas di medan perang, dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin dengan hirarki yang jelas, serta kode etik yang harus dipegang teguh. Dalam praktiknya, pembinaan disiplin di dalam organisasi militer sering kali terasa ketat, yang sering disebut sebagai “disiplin mati”, yang berarti militer harus menaati peraturan dan ketentuan kedinasan tanpa memberikan ruang untuk negosiasi atau pengecualian (KontraS, 2012). Namun, dikarenakan sifat kaku dan tegas tersebut, membuat masyarakat memandang bahwa sulit untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan lembaga militer yang ada.

Di samping itu, lembaga militer Indonesia pada masa Orde Baru memiliki fungsi yang berbanding terbalik dengan lembaga militer di masa Reformasi. Pada masa itu, lembaga militer memiliki peran penting dalam sektor ekonomi melalui usaha bisnis dan proyek-proyek pembangunan. Selain itu, dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, kekuasaan elit militer sangat dominan. Militer sering hadir secara fisik di komunitas-komunitas terutama daerah terpencil, dalam bentuk operasi keamanan, proyek-proyek pembangunan atau program sosial. Meski demikian, kegiatan militer juga seringkali terkait dengan pembatasan politik, penindasan terhadap oposisi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Elemen-elemen yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, seperti birokrasi, partai politik, parlemen dan lembaga eksekutif, tidak ada yang steril dari pengaruh militer (Eep Saefulloh Fatah, 2000). Dengan adanya hal-hal tersebut, hubungan antara lembaga militer dan masyarakat semakin tegang.

Pada masa Orde Baru, hubungan lembaga militer dan masyarakat tidak bisa dikatakan baik, karena terjadi banyak pemberontakan, yang disebabkan oleh tidak didengarnya aspirasi masyarakat oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang akhirnya merasa takut dengan instansi militer, yang seharusnya melindungi masyarakat dari gangguan dan ancaman. Banyak pula terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh lembaga militer pada masyarakat Indonesia, seperti penghilangan paksa dan

penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan yang dalam hal ini termasuk tentara, karena banyak individu yang tergabung dalam gerakan separatis atau politik yang bertentangan dengan pemerintah. Hal ini juga dikarenakan faktor internal dan eksternal, seperti adanya kelompok di dalam masyarakat yang menjadi ancaman bagi militer serta kelemahan-kelemahan politik dari kepemimpinan sipil yang memberikan peluang bagi militer untuk campur tangan dalam politik nasional, sehingga hubungan sipil-militer semakin menegang (Herdi Sahrasad, 2016).

Namun, pada tahun 2000-an mulai terjadi reformasi militer, seiring dengan peristiwa reformasi politik yang dimulai pada akhir tahun 1990-an. Langkah-langkah untuk memisahkan kekuasaan sipil-militer, meningkatkan transparansi, mengurangi campur tangan militer dalam politik, dan memperbaiki catatan pelanggaran HAM mulai ditempuh. Lembaga militer juga berusaha membangun hubungan yang lebih terbuka dan harmonis dengan masyarakat, berpartisipasi dalam dialog, serta mendukung program pembangunan masyarakat. Penting bagi lembaga militer untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan masyarakat. Maka dari itu, lembaga militer dapat memanfaatkan adanya *community relations*. Untuk menciptakan hubungan sipil-militer yang baik, diperlukan pondasi yang lebih mendasar, yang salah satunya adalah pembentukan pemerintahan demokratis yang didasarkan pada prinsip *rule of law*, dimana akuntabilitas publik terjaga dengan seimbang dalam berbagi aspek kebijakan, seperti personil, penentuan kekuatan, masalah pendidikan dan doktrin militer (David Setiawan dkk, 2013).

Sebagai institusi militer, Pusdik Arhanud telah melakukan beragam upaya untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, seperti adanya bantuan kemanusiaan dan bencana alam yang diberikan saat kondisi darurat akibat bencana alam atau keadaan krisis. Seperti pada tahun 2020, Pusdik Arhanud memberikan bantuan kepada warga Batu yang terdampak Covid-19, yang berdasarkan penuturan Komandan Pussen Arhanud Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, kegiatan Bakti Sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian satuannya terhadap warga sekitar. Selain itu, Pusdik

Arhanud juga menunjukkan kepeduliannya kepada para siswa berprestasi di Kota Batu, dengan memberikan Tali Asih sebagai wujud penghargaan kepada masyarakat.

Kerjasama ini dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan dan hubungan yang harmonis antara institusi militer dan masyarakat. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam membangun relasi yang baik tersebut, terdapat banyak sekali tantangan, seperti perbedaan budaya, persepsi dan harapan dari kedua belah pihak, seperti halnya tujuan dari *community relations*, yaitu menciptakan hubungan yang serasi, bermanfaat dan berkesinambungan bagi kedua belah pihak. Hal ini seringkali melibatkan berbagai kegiatan dan keterlibatan yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi, persepsi dan dukungan dari masyarakat. Keduanya saling berkesinambungan dan saling melengkapi. Yang perlu diperhatikan untuk menjalin hubungan baik antara sipil dan militer bukanlah *civilian supremacy* atau *non-civilian supremacy*, melainkan keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, yang diputuskan bersama. Kemudian, semua pihak akan turut memberikan kontribusinya secara utuh untuk membangun negara secara maksimal, dengan tetap menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).

Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan, guna mengetahui bagaimana hubungan yang terjalin antara militer dan masyarakat. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan peneliti dan pembaca dapat mengetahui perkembangan hubungan masyarakat dan militer, dari zaman Orde Baru yang cenderung kurang baik, hingga saat ini. Hal ini juga berguna untuk menunjukkan bahwasannya, tidak ada yang lebih tinggi antara sipil dan militer, keduanya adalah warga Negara Indonesia yang memiliki peran yang sama, yaitu untuk membangun NKRI agar menjadi tempat yang lebih baik dan aman bagi semua komponen masyarakatnya. Sejarah Indonesia menunjukkan pandangan yang berbeda terhadap pengaruh kegiatan militer, menyebabkan terjadinya pemisahan yang jelas antara ranah sipil dan militer, yang memerlukan adanya kerjasama harmonis antar kedua belah pihak. Hal

ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang bersatu dengan tujuan dan visi yang seragam dalam membangun masa depan negara (David Setiawan dkk, 2013). Salah satunya adalah melalui *community relations*, yang memang ditujukan untuk memelihara keeratan, agar tidak ada jarak antara kedua belah pihak, sehingga dapat sekaligus menumbuhkan pemahaman masyarakat, bahwasannya Pusdik Arhanud dalam hal ini tidak hanya berperan dalam bidang keamanan dan pertahanan saja.

Peran *community relations* sangat penting, karena dapat menyelesaikan beberapa permasalahan, seperti permasalahan ekonomi, penyebaran informasi, serta mendapat dukungan dan pengakuan dari pihak eksternal bahkan pemerintah. Baik Pusdik Arhanud, ataupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya akan merasakan manfaat baik, apabila menerapkan *community relations*. Masyarakat sebagai pihak eksternal akan dibantu dari segi keamanan dan pendidikannya. Institusi atau organisasi sebagai pihak internal tentu akan dipandang baik oleh pihak luar. Praktik berorganisasi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan atau para pemangku kepentingan. Ketika berbicara tentang manajemen organisasi, penting untuk diingat bahwa publik, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, memiliki peran yang sangat signifikan. Suatu organisasi dapat dianggap baik apabila mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan publiknya, mengingat proses untuk menyatukan sipil-militer cukup sulit, karena menyangkut dua keinginan masyarakat yang berpotensi bertentangan. *To achieve successful collaboration with a community, all parties involved need to strive to understand the point of view of "insiders," whether they are members of a neighborhood, religious institution, health practice, community organization, or public health agency. Key to developing such understanding is recognizing one's own culture and how it shapes one's beliefs and understanding of health and illness* (Airhihenbuwa, 2007).

Partisipasi masyarakat yang berkualitas tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik, namun juga mencakup kontribusi terhadap pengambilan keputusan, pemberian gagasan serta pembagian tanggung jawab (*Principles*

of *Community Engagement*, 2011). Harmoni ini tercermin dalam pemahaman dan dukungan yang diberikan oleh publik terhadap kebijakan organisasi. Dalam hal ini, komunikasi sosial menjadi penting, mengingat peran utama komunikasi sosial adalah membentuk hubungan antara individu, memfasilitasi kerjasama, menyebarkan informasi, serta memahami bagaimana masyarakat berinteraksi. Selain itu, komunikasi sosial memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara individu memandang isu-isu sosial, membentuk budaya, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Komunikasi sosial juga dapat diartikan menjadi suatu aktivitas komunikasi untuk tujuan integrasi sosial (Vera & Wihardi, 2012).

Institusi militer memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan suatu wilayah atau bahkan negara. Mereka bertugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal, serta menjaga ketertiban sosial. Disinilah peran *community relations* dapat terlihat, bahwa kehadiran institusi militer dan hubungan baik dengan masyarakat lokal dapat membantu mencegah atau mengatasi potensi kerusuhan sosial dan konflik bersenjata. Selain itu, institusi militer seringkali terlibat dalam proyek-proyek pembangunan wilayah seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ketika hubungan mereka dengan masyarakat lokal terjalin dengan baik, ini dapat memfasilitasi kerjasama yang produktif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Waaster Panglima TNI mengatakan bahwa dalam situasi modern seperti saat ini dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam memperkuat aparat teritorial. Hal ini harus dilakukan oleh setiap Angkatan dengan bekerjasama dan berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal. TNI tidak boleh diam terhadap perkembangan kondisi, melainkan harus aktif dalam membangun suasana kondusif di tengah masyarakat (Koesnanto, 2002)

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

Bagaimana upaya Pusdik Arhanud dalam mengembangkan citra dan kesadaran masyarakat terhadap posisi dan kehadiran mereka?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi upaya apa yang telah dilakukan Pusdik Arhanud dalam *community relations* untuk menumbuhkan citra positif serta kesadaran masyarakat terkait posisi dan kehadiran mereka.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis

- a. Menyediakan data dan pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan kurikulum di program studi Ilmu Komunikasi atau studi lain yang berkaitan.
- b. Memberikan kontribusi pada diskusi akademis terkait dengan komunikasi sosial, hubungan militer-masyarakat serta peran institusi militer pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi Pusdik Arhanud untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dengan memahami dinamika dan preferensi komunikasi masyarakat setempat.
- b. Merangsang partisipasi masyarakat dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pusdik Arhanud, meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan.